

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab kajian Pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

Tabel 1. 1 Tinjauan Literatur

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
.	Peran <i>UN World Food Programme (WFP)</i> Terhadap Kerawanan Pangan di Namibia (2022)	Rizky Anggia Putri, Falhan Hakiki (Putri & Hakiki, 2022).	Kedua penelitian memiliki fokus yang sama membahas apa yang dilakukan WFP dalam memberikan bantuan kemanusiaan.	Perbedaannya penelitian mereka fokus pada negara Namibia, sedangkan penelitian saya fokus pada Nigeria.
.	Food Security in Nigeria: Impetus for Growth and Development (2021)	Idris A. Ayinde, Olutosin A. Otekunrin, Sakiru O. Akinbode, Oluwaseun A. Otekunrin (Ayinde et al., n.d.)	Persamaan penelitian saya dengan penelitian Idris A. Ayinde yaitu, keduanya sama menyoroti tentang penyediaan pangan yang cukup bagi penduduk Nigeria.	Penelitian mereka berfokus pada masalah pembangunan, sedangkan penelitian saya kurang fokus pada pembangunannya.

	The Geopolitics of Food Security: Barriers to The Sustainable Development Goal of Zero Hunger (2020)	Jiayi Zhou, Lisa Maria Dellmuth, Kevin M. Adams, Tina-Simone Neset and Nina Von Uexkull (ZHOU-GEOPOLITICSFOODSECURITY-2020, n.d.).	Kedua penelitian sama membahas kerawanan pangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.	Perbedaannya penelitian mereka lebih fokus terhadap faktor geopolitik, sedangkan penelitian saya tidak berfokus pada faktor itu.
	Sustainability of the Zero Hunger Support Systems of Faith Based Organisations in Nigeria (2022)	Ayot unde William Okelana (Okelana, 2022).	Persamaan penelitian Ayotunde dengan penelitian saya, yaitu keduanya membahas peran organisasi dalam menangani masalah kelaparan di Nigeria.	Penelitian Ayotunde menggunakan Organisasi Berbasis Keagamaan, sedangkan penelitian saya menggunakan sudut pandang Organisasi Internasional yaitu WFP.
	Food Security, Institutional Framework and technology; Examining the Nexus in Nigeria Using ARDL Approach (2018)	Romanus Osabohien, Evans Osabuohien and Ese (Osabohien et al., 2018).	Persamaan penelitian saya dengan penelitian Romanus Osabohien, yaitu keduanya sama menganalisis kondisi ketahanan pangan di Nigeria.	Penelitian yang dibahas Romanus Bersama Partnernya mengusulkan solusi untuk meningkatkan kerawanan pangan melalui kemajuan teknologi, sedangkan penelitian saya melalui peran WFP.

Literatur pertama adalah jurnal yang berjudul “**Peran UN World Food Programme (WFP) Terhadap Kerawanan Pangan di Namibia**” yang ditulis oleh Rizky Anggia Putri dan Falhan Hakiki membahas tentang fungsi World Food Programme (WFP) dalam mengatasi kerawanan pangan di Namibia. Penulis menyelidiki berbagai cara yang digunakan oleh WFP untuk melindungi hak asasi manusia, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mendukung pengembangan kapasitas dalam menanggapi kerentanan ketahanan pangan di Namibia.

Rizky Anggia putri dan Falhan Hakiki juga menjelaskan World Food Programme (WFP) dalam menjalankan beberapa program dan inisiatif untuk mengatasi kerawanan pangan. Program-program tersebut meliputi Program Kesejahteraan Sosial, yang memberikan dukungan kepada penduduk yang rentan selama krisis. Lalu ada juga Program Gizi Sekolah, yang menyediakan makanan sekolah dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan mereka.

Kedua penelitian memiliki fokus yang sama, yaitu membahas apa yang dilakukan oleh WFP dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Perbedaannya penelitian mereka fokus pada negara Namibia, sedangkan penelitian penulis fokus pada negara Nigeria.

Dalam *Literatur kedua* yang disusun oleh Idris A. Ayinde, Olutosin A. Otekunrin, Sakiru O. Akinbode, Oluwaseun A. Otekunrin dengan judul “**Food Security in Nigeria: Impetus for Growth and Development**”, penelitian ini menjelaskan ketahanan pangan di Nigeria. Penulis menunjukkan bahwa Nigeria menghadapi tantangan dalam menyediakan pasokan pangan yang memadai bagi penduduknya dan memberikan insentif untuk pertumbuhan dan kemajuan.

Idris A. Ayinde, Olutosin A. Otekunrin, Sakiru O. Akinbode, dan Oluwaseun A. Otekunrin juga memaparkan bahwa Nigeria memiliki populasi tertinggi yang hidup dalam kemiskinan ekstrim di dunia, dengan akses yang sangat terbatas terhadap makanan serta faktor utama yang menyebabkan kerawanan pangan di Nigeria adalah konflik, pemberontakan, kemiskinan, perubahan iklim, dan kurangnya sumber daya manusia. Studi ini juga membahas bahwa negara bagian

timur laut dan utara- tengah telah mengalami dampak yang signifikan, yang mengakibatkan malnutrisi dan kekurangan pangan. Untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah setempat telah menerapkan program perlindungan sosial, program Peminjam Jangkar, meningkatkan produktivitas pertanian, mendorong investasi sektor swasta di sektor pertanian, dan memerangi kerawanan dan konflik.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Idris A. Ayinde yaitu, keduanya sama menyoroti tentang penyediaan pangan yang cukup bagi penduduk Nigeria. Penelitian sebelumnya berfokus pada masalah pembangunan negara, sedangkan penelitian penulis tidak berfokus pada pembangunan negara saja, melainkan pada keberjasama pemerintah negara dengan organisasi internasional.

Dalam *Literatur ketiga* yang berjudul **“Sustainability of the Zero Hunger Support Systems of Faith Based Organisations in Nigeria”** karya dari Ayotunde William Okelana ini menjelaskan bagaimana melihat konteks utamanya yaitu “zero hunger” dari sisi organisasi berbasis agama, bagaimana mereka mendukung sistem keberlanjutannya dan lain sebagainya. Peneliti tidak membahas peran World Food Programme (WFP) maupun FAO atau organisasi PBB lainnya tetapi membahas peran dari organisasi keagamaan yang ada di Nigeria.

Tetapi, benang merah literatur ini dengan topik yang saya bahas adalah bagaimana pihak-pihak yang terlibat turut menyelaraskan diri dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu salah satu poinnya adalah Zero Hunger atau menyelesaikan krisis kelaparan yang terjadi di dunia. Penulis juga memuat data-data valid mengenai angka kelaparan di Nigeria dan keterlibatan peran organisasi keagamaan dalam menangani krisis kelaparan ini. Kesimpulan dari literatur ini adalah bahwa organisasi keagamaan disini terutama gereja memainkan peran juga dalam menangani krisis kelaparan guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan penggunaan teknologi dalam sistem produksi makanan dapat menjadi suatu peningkatan yang bagus guna mencapai Zero Hunger.

Kedua penelitian sama membahas masalah kerawanan pangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, perbedaannya penelitian sebelumnya lebih fokus terhadap

faktor geopolitik, sedangkan penelitian penulis tidak membahas pada faktor geopolitik melainkan faktor dari konflik yang terjadi di Nigeria.

Dalam *Literatur keempat* dengan judul **“The Geopolitics of Food Security: Barriers to The Sustainable Development Goal of Zero Hunger”** karya Jiayi Zhou, Lisa Maria Dellmuth, Kevin M. Adams, Tina- Simone Neset dan Nina Von Yuexkull ini menjelaskan apa saja hambatan yang ada dalam mencapai salah satu poin SDGs yaitu Zero Hunger terutama dari sisi geopolitik keamanan pangan. Pembahasan dalam penelitian ini cukup kompleks karena membahas dari berbagai sisi seperti Pentingnya Perdagangan, Perebutan Sumber Daya Alam, Perubahan Iklim, Konflik Bersenjata, dan lain sebagainya. Penelitian ini menaruh perhatian besar terhadap dimensi geopolitik namun dari itu semua, tujuan utama dari pembahasan ini tetap selaras dengan konsep Zero Hunger yang saya bahas pada topik penelitian saya.

Persamaan penelitian Ayotunde dengan penelitian saya, yaitu keduanya membahas peran organisasi dalam menangani masalah kelaparan di Nigeria, penelitian Ayotunde menggunakan organisasi berbasis keagamaan, sedangkan penelitian saya menggunakan sudut pandang organisasi internasional.

Dalam *Literatur kelima* yang disusun oleh Romanus Osabouhien, Evans Osabouhien, dan Esai dengan judul **“Food Security, Institutional Framework and Technology: Examining the Nexus in Nigeria Using ARDL Approach”**, penelitian ini menganalisis kondisi ketahanan pangan Nigeria saat ini dan menyarankan cara meningkatkannya dengan kemajuan teknologi dan kerangka kerja kelembagaan. Dalam penelitiannya, penulis mengusulkan bahwa tingkat ketersediaan pangan di Nigeria dapat ditingkatkan melalui investasi dalam teknologi dan kerangka kerja kelembagaan.

Romanus Osabouhien dan Evans Osabouhien mengusulkan bahwa peningkatan hasil pertanian, pengurangan kerentanan kemiskinan di pedesaan, dan pada gilirannya, peningkatan ketahanan pangan dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan teknis pertanian melalui investasi dalam teknologi. Untuk mengatasi tantangan kerawanan pangan, ketersediaan lahan subur juga dianggap sebagai faktor

utama dalam meningkatkan produksi pangan. Dalam penelitiannya, disarankan agar pemerintah dan petani berkolaborasi secara aktif untuk mengatasi masalah perencanaan penting yang terkait dengan produksi pangan, serta kebijakan perlindungan sosial yang ditujukan untuk sektor pertanian untuk melindungi petani yang rentan dan menghindari bahaya yang terkait dengan pertanian.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Romanus Osaboahien, yaitu keduanya sama menganalisis kondisi ketahanan pangan di Nigeria, penelitian yang dibahas Romanus bersama partnernya mengusulkan solusi untuk meningkatkan kerawanan pangan melalui kemajuan teknologi, sedangkan penelitian penulis melalui program dan kerjasama pemerintah negara dengan organisasi internasional.

2.2 Kerangka Teoritis/ Konseptual

2.2.1 Keamanan Non- tradisional dan Keamanan Pangan

Keamanan non- tradisional lahir sebagai turunan dari metode konvensional dalam penelitian keamanan internasional yang mencakup keamanan nasional serta pendekatan non- militer dan kemanusiaan. Selain itu, keamanan non- tradisional juga menekankan betapa pentingnya aktor non- negara seperti organisasi internasional, individu, dan kelompok masyarakat untuk diterapkan. Konsep ini berhubungan dengan perkembangan dunia, termasuk masalah seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan konflik social budaya (Barry Buzan, 2009).

Keamanan pangan yang merupakan salah satu turunan dari keamanan non- tradisional dapat dikatakan penting karena ketergantungan pangan yang cukup dan seimbang untuk menjalani kehidupan yang cukup. Keamanan non- tradisional mencakup ancaman seperti krisis pangan, kejahatan pangan, ketergantungan pada impor, dan perubahan iklim. Krisis pangan muncul disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, kekurangan sumber daya, dan gangguan logistik. Kejahatan pangan, seperti bisnis ilegal, perdagangan manusia, dan narkoba, dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Negara yang bergantung pada impor bahan pangan dapat membuat negara menjadi lebih

bergantung pada impor. Keamanan Pangan terkait erat dengan keamanan non-tradisional, yang mencakup ancaman-ancaman yang tidak bersifat militer dan memerlukan pendekatan yang lebih luas dan inklusif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di seluruh dunia (Barry Buzan, 2009).

Food and Agriculture Organization mendefinisikan bahwa, keamanan pangan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan makanan sehat dan aman yang memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka untuk hidup aktif dan sehat.(FAO, 2008). Di sisi lain, krisis pangan dapat muncul karena beberapa faktor seperti konflik, penurunan ekonomi, perubahan iklim, dan bencana alam, yang mengakibatkan kesulitan keuangan bagi banyak orang.

Hubungan antara keamanan pangan dan krisis pangan terlihat jelas dalam cara keamanan pangan memastikan dalam memenuhi tantangan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan sepanjang waktu (FAO, 2008). Di saat krisis seperti pandemi COVID-19, penggunaan pasokan dan ketersediaan pangan yang lebih tepat sangatlah penting untuk mencegah kekurangan pangan bagi para kelompok yang rentan (Kakaei et al., 2022).

Konsep keamanan pangan sebagaimana didefinisikan oleh FAO, digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan mengkarakterisasi krisis pangan di Nigeria dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keamanan pangan, termasuk ketersediaan pangan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas.

Sustainable Development Goals 2030 menguraikan semua tujuannya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi, dengan dua tujuan utama yang fokus pada masalah mengakhiri kelaparan dan memastikan akses tahunan terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup. Selain itu, SDG juga akan memberantas segala bentuk malnutrisi dengan tujuan memastikan akses terhadap makanan bergizi dan cukup bagi semua orang (World Health Organization, 2014).

Isu global yang menarik perhatian masyarakat, seperti konflik Rusia- Ukraina dan Covid- 19 telah merusak ketahanan pangan global. Kejadian ini telah meningkatkan resiko pangan dan malnutrisi secara ekonomi, terutama pada negara-negara berpenghasilan rendah. Sedangkan pada negara maju banyak yang

mengalami inflasi dan kenaikan harga pangan (Organisation for Economic Co-operation and Development, n.d.)

Nigeria, negara berpenduduk terbanyak di benua Afrika, tengah bergulat dengan krisis pangan akut yang kompleks. Krisis ini bagaikan badai dahsyat yang menghantam jutaan rakyat, mendorong mereka ke jurang kelaparan (Jusriadi et al., 2020). Akar permasalahan ini tertanam kuat dalam tiga faktor utama:

1) Konflik Bersenjata

Gejolak yang berkepanjangan di berbagai wilayah, terutama yang diakibatkan oleh kelompok bersenjata seperti Boko Haram, telah mengganggu aktivitas pertanian dan menghambat akses masyarakat terhadap makanan. Lahan pertanian yang hancur, infrastruktur yang rusak, dan rasa tidak aman yang menyelimuti membuat proses produksi dan distribusi pangan menjadi terhambat.

2) Perubahan Iklim

Kekeringan dan banjir yang melanda wilayah Nigeria secara berkala memperparah kerawanan pangan, terutama di daerah pedesaan. Fenomena ini kian memperburuk kesuburan tanah, merusak tanaman, dan mengganggu siklus panen. Dihadapkan pada kondisi ini, para petani kecil semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi diri dan keluarga mereka.

3) Kemiskinan Ekstrem

Jurang kemiskinan yang lebar di Nigeria menjadi faktor pendorong utama kerawanan pangan. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Hal ini membuat mereka rentan terhadap krisis pangan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Ketiga faktor ini bagaikan benang kusut yang saling terkait, memperparah krisis pangan di Nigeria dan mendorong jutaan orang ke jurang kelaparan. Upaya untuk mengatasi krisis ini membutuhkan solusi komprehensif yang tidak hanya fokus pada penyediaan bantuan pangan darurat, tetapi juga menangani akar permasalahan secara berkelanjutan. Di tengah situasi genting ini, World Food Programme (WFP),

organisasi kemanusiaan PBB, memainkan peran penting dalam memberikan bantuan pangan dan nutrisi kepada mereka yang paling membutuhkan. Upaya WFP di Nigeria tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan mengatasi akar penyebab krisis.

a. Menanggulangi Ancaman Keamanan Non-Tradisional

Krisis pangan di Nigeria memiliki kaitan erat dengan ancaman keamanan non-tradisional, seperti:

- a) Konflik dan Ketidakstabilan: Kelompok bersenjata seperti Boko Haram telah mengganggu aktivitas pertanian dan menghambat akses terhadap makanan.
- b) Bencana Alam: Kekeringan dan banjir yang sering terjadi memperburuk kerawanan pangan, terutama di daerah pedesaan.
- c) Pengungsian: Konflik dan bencana alam telah memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka, membuat mereka bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.

Upaya WFP dalam mengatasi krisis pangan di Nigeria secara tidak langsung berkontribusi dalam menanggulangi ancaman keamanan non-tradisional. Dengan menyediakan makanan dan nutrisi, WFP membantu menstabilkan komunitas, mengurangi risiko konflik, dan mendukung pembangunan perdamaian.

b. Memperkuat Ketahanan Pangan:

Selain memberikan bantuan darurat, WFP juga bekerja untuk meningkatkan ketahanan pangan di Nigeria dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan melalui berbagai program, seperti:

- a) Mendukung petani kecil: WFP menyediakan pelatihan, benih, dan peralatan kepada petani kecil untuk meningkatkan hasil panen dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
- b) Membangun infrastruktur: WFP membangun dan memperbaiki infrastruktur penyimpanan dan distribusi makanan untuk mengurangi kehilangan pasokan dan memastikan akses yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan.
- c) Mempromosikan nutrisi: WFP memberikan edukasi tentang gizi kepada masyarakat, terutama kepada ibu dan anak-anak, untuk mencegah malnutrisi dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

2.2.2 Liberal Institutional

Liberalisme Institutional merupakan teori politik yang mengusulkan bahwa stabilitas dan keberhasilan suatu negara tergantung pada keberadaan institusi yang kuat dan demokratis, seperti sistem hukum, lembaga pemerintah, dan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel (Windy Anggraeni et al., 2023). Teori ini mengusulkan bahwa negara-negara yang memiliki institusi yang kuat dan demokratis lebih cenderung untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dalam hal pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan warganya. Teori ini mengusulkan bahwa negara-negara yang kurang memiliki institusi yang kuat dan demokratis lebih cenderung menghadapi tantangan seperti korupsi, ketidakstabilan politik, dan ketidaksetaraan ekonomi. Teori ini mengusulkan bahwa negara-negara yang ingin mencapai hasil yang lebih baik harus berinvestasi dalam membangun institusi yang kuat dan demokratis, dan memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik.

Di tengah krisis pangan akut yang melanda Nigeria, World Food Programme (WFP), organisasi kemanusiaan PBB, memainkan peran penting dalam memberikan bantuan dan solusi. Upaya WFP di Nigeria dapat dianalisis melalui kerangka kerja liberal institusional, sebuah teori dalam hubungan internasional yang menekankan peran institusi dan kerjasama internasional dalam mengatasi berbagai permasalahan global, termasuk krisis pangan.

Menurut teori ini, organisasi internasional seperti WFP dapat memainkan peran penting dalam:

a. Memfasilitasi kerjasama antar negara

WFP bagaikan jembatan penghubung, mendorong negara-negara Afrika dan komunitas internasional untuk bahu membahu dalam membantu Nigeria. WFP juga mengorkestrasi koordinasi bantuan pangan dan pendanaan, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya penyelamatan. Kerjasama ini menjadi bukti nyata bahwa solidaritas global mampu mengatasi krisis yang kompleks.

b. Menetapkan norma dan standar

WFP bekerja sama erat dengan pemerintah Nigeria untuk menetapkan standar gizi dan keamanan pangan yang tinggi. Standar ini menjadi kompas bagi semua pihak

dalam memastikan kualitas makanan yang diterima masyarakat. WFP juga mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan, memastikan kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan jangka panjang.

c. Membangun kapasitas lokal

WFP bukan sekadar memberikan bantuan, tapi juga membekali pemerintah dan masyarakat Nigeria dengan pengetahuan dan keahlian. Pelatihan dan pendampingan diberikan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola ketahanan pangan. Dengan demikian, Nigeria diharapkan mampu mandiri dalam menghadapi krisis di masa depan.

Upaya *World Food Programme* di Nigeria bukan sekedar pemberian bantuan, tetapi investasi untuk masa depan dengan menggabungkan bantuan darurat, program ketahanan pangan, dan edukasi gizi. WFP juga berusaha keras untuk menciptakan sistem pangan yang Tangguh dan berkelanjutan, sehingga rakyat Nigeria dapat hidup tanpa krisis pangan.

2.2.3 Sustainable Development Goals (SDG's) Sebagai Agenda Pembangunan Internasional

Krisis pangan akut yang melanda Nigeria menjadi pengingat pahit akan tantangan global dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 2: Tanpa Kelaparan (Wandananarum et al., 2021). Jutaan rakyat Nigeria terjebak dalam jurang kelaparan, terancam oleh konflik bersenjata, perubahan iklim, dan kemiskinan ekstrem. SDG 2 bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, dengan fokus pada mengatasi kemiskinan ekstrem. Krisis di Nigeria menunjukkan bahwa mencapai ketahanan pangan adalah tantangan yang kompleks yang membutuhkan upaya terpadu dari berbagai pihak.

Krisis pangan di Nigeria merupakan sebuah realita yang berat, sebagaimana adanya beberapa factor:

a) Populasi Terbesar, Kelaparan Terbesar:

Nigeria, negara dengan populasi terbesar di Afrika, menjadi ironis dengan krisis pangan yang mencengkeram rakyatnya. Jutaan orang, terutama di daerah pedesaan, kekurangan akses terhadap makanan bergizi, terancam oleh malnutrisi, dan hidup dalam kelaparan.

b) Konflik Bersenjata dan Kemiskinan Ekstrem:

Gejolak yang berkepanjangan di berbagai wilayah, terutama akibat kelompok bersenjata seperti Boko Haram, mengganggu aktivitas pertanian dan distribusi makanan. Kemiskinan ekstrem yang merajalela di pedesaan semakin memperparah situasi, membuat masyarakat rentan terhadap krisis pangan.

c) Perubahan Iklim: Ancaman Baru:

Kekeringan dan banjir yang melanda Nigeria secara berkala memperburuk kerawanan pangan, merusak tanaman, dan mengganggu siklus panen. Petani kecil dihadapkan pada tantangan baru dalam beradaptasi dengan perubahan iklim dan memastikan ketahanan pangan bagi komunitas mereka.

Upaya WFP di Nigeria sejalan dengan target dan indikator yang ditetapkan dalam SDG 2. Berikut beberapa contoh:

- 1) Mengakhiri kelaparan dan memastikan akses bagi semua orang, khususnya kelompok miskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan, termasuk bayi terhadap makanan yang aman, cukup dan bergizi.
- 2) Menggandakan produktivitas pertanian skala kecil dan produksi sistem pangan berkelanjutan. Bekerjasama dengan petani kecil di Nigeria untuk meningkatkan hasil panen, dan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan.
- 3) Presentase populasi yang mengalami kelaparan parah, dan WFP berupaya melakukan survei serta pemantauan untuk melacak tingkat kelaparan di Nigeria dan mengukur dampak dari program-program mereka.

Upaya World Food Programme (WFP) dalam mengatasi krisis pangan di Nigeria merupakan contoh nyata dari bagaimana organisasi internasional dapat berkontribusi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan fokus pada ketahanan pangan, akses terhadap makanan, dan meningkatkan gizi,

WFP berusaha keras untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua orang.

2.2.4 Global Governance

Di era globalisasi yang dinamis ini, masalah-masalah dunia melampaui batas negara dan membutuhkan solusi kolektif. Teori Global Governance membahas berbagai pendekatan teoretis yang digunakan untuk memahami tata kelola global, termasuk liberalisme, realisme, konstruktivisme sosial, English School, teori kritis, dan teori interaksi organisasi. Teori-teori ini membantu dalam menganalisis peran aktor, proses, dan efektivitas dalam kerangka tata kelola global (Karns et al., 2015). Disinilah teori global governance muncul, menawarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana aktor-aktor global bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan Bersama (Mailangkay, 2023). Teori global governance bukan sekadar konsep abstrak, melainkan panduan praktis untuk mengelola isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan krisis pangan. Teori ini menekankan pentingnya kerjasama, koordinasi, dan kebijakan yang koheren dalam mencapai tujuan bersama.

Untuk memahami konteks global di balik upaya WFP, penting untuk memahami teori global governance. Teori ini menjelaskan bagaimana aktor-aktor global, seperti negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, bekerja sama untuk mengatasi berbagai permasalahan global, termasuk krisis pangan.

Adanya beberapa prinsip utama dalam teori global governance meliputi:

a) Kerjasama:

Kerjasama merupakan jiwa dari global governance. Aktor-aktor global, seperti negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, harus bekerja sama untuk mengatasi permasalahan global. Hal ini membutuhkan dialog terbuka, saling pengertian, dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang disepakati.

Contoh Kerjasama: Millennium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs): Tujuan-tujuan global ini mengarahkan upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memberantas kemiskinan, kelaparan, dan penyakit.

b) Keberpihakan:

Keberpihakan menjadi prinsip penting dalam global governance. Upaya global governance harus berfokus pada membantu negara-negara berkembang dan masyarakat yang rentan, seperti kelompok miskin, perempuan, dan anak-anak. Hal ini membutuhkan kebijakan yang adil dan inklusif, serta alokasi sumber daya yang tepat sasaran.

Contoh Keberpihakan: Bantuan Kemanusiaan: Organisasi internasional seperti PBB dan Palang Merah memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang terkena bencana alam atau konflik.

c) Akuntabilitas:

Akuntabilitas menjadi kunci dalam global governance. Aktor-aktor global harus transparan selama proses pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini membutuhkan mekanisme kontrol dan pengawasan yang efektif, serta publikasi informasi yang terbuka.

Contoh Akuntabilitas: Laporan dan Audit: Organisasi internasional dan lembaga donor secara berkala menerbitkan laporan dan audit tentang penggunaan dana dan kinerja program mereka.

d) Partisipasi:

Partisipasi merupakan esensi dalam global governance. Semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat lokal, harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Hal ini membutuhkan keterbukaan dan inklusivitas, serta mekanisme partisipasi yang bermakna.

Contoh Partisipasi: Konsultasi Publik: Organisasi internasional dan pemerintah mengadakan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang berbagai isu global.

Upaya WFP di Nigeria sejalan dengan prinsip-prinsip dalam teori global governance. Berikut beberapa contoh:

- a) Kerjasama: WFP bekerja sama dengan pemerintah Nigeria, organisasi internasional lainnya, dan masyarakat sipil untuk mengatasi krisis pangan di Nigeria.
- b) Keberpihakan: Program-program WFP difokuskan pada membantu masyarakat yang paling rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan orang tua.

c) Akuntabilitas: WFP secara terbuka melaporkan kegiatan dan dampak program-programnya kepada publik dan donor.

Partisipasi: Masyarakat lokal dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program WFP.

Upaya *World Food Programme* dalam mengatasi krisis pangan di Nigeria merupakan contoh nyata dari bagaimana teori Global Governance dapat diterapkan dalam praktik. Dengan cara Kerjasama, keberpihakan, akuntabilitas, dan partisipasi. WFP berusaha keras untuk membangun ketahanan pangan dan kemandirian bagi masyarakat Nigeria.

2.2.5 Teori Organisasi Internasional

Teori Organisasi Internasional adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa organisasi internasional didirikan dan beroperasi. Teori ini membahas evolusi dan fungsi organisasi internasional dalam konteks sistem negara dan inovasi tata kelola global. Hal ini mencakup pembahasan tentang organisasi fungsional dan khusus, pengadilan internasional untuk penyelesaian sengketa, serta peran organisasi dalam mempengaruhi kebijakan global. Teori-teori ini membantu dalam memahami bagaimana organisasi internasional berinteraksi, beradaptasi, dan memengaruhi dinamika tata kelola global (Karns et al., 2015).

Di era globalisasi yang dinamis ini, masalah-masalah dunia melampaui batas negara dan membutuhkan solusi yang kolektif. Disinilah organisasi internasional berperan menawarkan platform kerjasama untuk mengatasi berbagai tantangan Bersama. Organisasi internasional bukan sekedar kelompok eksekutif bagi negara-negara, melainkan entitas formal dengan kepribadian hukum dan tujuan Bersama.

Organisasi ini didirikan melalui kesepakatan internasional, dan keanggotaannya terbuka bagi negara-negara yang memenuhi syarat. Teori organisasi internasional menganjurkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana organisasi ini bekerja, apa yang mereka capai, dan bagaimana mereka mempengaruhi dunia. Teori ini membantu kita untuk menganalisis peran, struktur, dan fungsi organisasi internasional, serta menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan Bersama.

Dalam ilmu hubungan internasional pada saat ini, peran organisasi internasional terbilang penting karena seringkali berhasil menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara bahkan dapat mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut di kemudian hari. Buku berjudul *International Organizations* karya Clive Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota baik pemerintah maupun non- pemerintah dari dua atau lebih negara dengan tujuan mengejar kepentingan bersama anggotanya. Organisasi internasional dapat memiliki banyak peran bagi negara yang terlibat didalamnya seperti tempat bertemu atau menjadi wadah bagi negara yang terlibat dalam membahas suatu hal yang sedang terjadi, dapat pula berperan sebagai pembuat keputusan dalam merencanakan suatu hal (Clive Archer, 2001).

Melalui bukunya, Clive Archer menjelaskan tujuan dan fungsi organisasi internasional. Tiga organisasi internasional utama dalam sistem internasional meliputi:

1. **Instrumen:** peran organisasi internasional sebagai panduan atau alat bagi negara-negara yang berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan nasional dengan fokus pada pemenuhan prioritas nasional.
2. **Arena:** peran organisasi internasional sebagai sarana bagi setiap bangsa untuk berdiskusi dan meningkatkan perdamaian global. Peran sebuah organisasi internasional dalam hal ini sebagai ruang terjadinya negosiasi.
3. **Aktor:** gagasan tentang organisasi internasional sebagai aktor yang tidak memiliki yurisdiksi atas negara mana pun atau bahkan menghalanginya dalam memulai perundingan.

Dalam hubungan internasional, terdapat dua kategori pembagian organisasi internasional yaitu IGO atau *International Governmental Organization* dan *Non-Governmental Organizational*. Contoh organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi yang berada dalam naungan PBB sebagai induk yaitu UNICEF, UNESCO, dan WFP, dan lain sebagainya termasuk kedalam IGO sedangkan NGO berisi organisasi swasta yang independen dan tidak terikat oleh negara manapun seperti Green Peace, Palang Merah Internasional, dan lain-lain.

Setelah Perang Dunia II berakhir, Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) didirikan di San Fransisco pada tanggal 24 Oktober 1945. Organisasi ini bertentangan dengan 192 negara pada tahun 1946 dengan tujuan memerangi konflik internasional, memperbaiki taraf hidup manusia, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Kerangka pemerintah PBB juga mencakup hal- hal seperti resolusi konflik, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan. Selain itu juga, PBB menangani masalah seperti produksi pangan, dan kesetaraan gender (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

Organisasi internasional baik Non-Governmental ataupun International Governmental sudah pasti memiliki fungsi dan tujuan yang mereka inginkan, dalam hal ini yaitu World Food Programme atau sering disebut WFP yang merupakan organisasi turunan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas menangani permasalahan kelaparan dan juga krisis pangan di seluruh dunia.

WFP menjalankan perannya sebagai instrumen, selaras dengan peranan organisasi internasional untuk mencapai tujuan tertentu dalam hal ini yaitu menyelesaikan krisis pangan yang terjadi di benua afrika yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Bentuk bantuan yang diberikan oleh organisasi WFP ini mayoritas berupa bantuan makanan dan itu selaras dengan prioritas utama dari World Food Programme yaitu mencapai Zero Hunger, satu dari tujuh belas tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Menurut data dari situs resmi WFP, kurang lebih 82 negara telah menerima bantuan dari organisasi tersebut dan itu membuktikan bahwa WFP telah menjalankan pengertian dari teori organisasi international dengan sangat baik (Clive Archer, 2001).

2.3 Asumsi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menarik asumsi “World Food Program bekerjasama dengan pemerintah Nigeria dapat mengurangi krisis pangan akibat konflik, dengan menjaga ketersediaan pangan, aksesibilitas, pemanfaatan dan stabilitas pangan di Nigeria”.

2.4 Kerangka Penelitian

